

Dinas Perhubungan Banjarmasin Kerjakan Proyek Prioritas Wali Kota Termasuk KIR dan Maksimalkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/tahun-ini-dishub-maksimalkan-retribusi-kir/>

Beberapa program kerja dan proyek infrastruktur bakal dikerjakan Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin, tahun ini.

Di antaranya, yakni proyek konektivitas transportasi darat dengan sungai di kawasan 0 KM, yang merupakan salah satu program prioritas Walikota Banjarmasin.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin Slamet Begjo, proyek tersebut guna wajah baru dari kawasan 0 km.

Ia menjelaskan, proyek konektivitas sungai dan darat itu, untuk menata angkutan sungai dengan angkutan darat yang sudah ada.

“Seperti TransBanjarmasin, TemanBus dan angkutan bandara yang nantinya akan disatukan di kawasan 0 km. Jadi akan kita tata di sana, karena koneksinya luar biasa untuk angkutan,” katanya.

Selain itu, Bedjo mengatakan, kegiatan lain yang menjadi program kerjanya, yakni penambahan lab pengujian KIR.

Retribusi kir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. Pada 2022 kemarin, Dinas Perhubungan mendapatkan sekitar Rp 900 juta dan rencananya pada tahun 2023 ini ditargetkan sekitar Rp 2 milyar.

“Jadi akan kita coba membangun 1 lagi lab KIR di samping yang sudah ada, sekaligus pengadaan alat ujinya. Karena yang ada sekarang ini kapasitasnya sangat terbatas dan tidak bisa maksimal,” ucapnya.

Dia juga menyatakan, akan memaksimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan.

Misalnya, perolehan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor yang diprediksi akan mendapat dua kali lipat.

Kemudian retribusi parkir yang lumayan besar potensinya, membuat pihaknya tak mau ada kebocoran. Sehingga akan mulai menerapkan sistem pembayaran non tunai di beberapa titik.

“Kita sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan para pengelola parkir. Kalau tidak akhir atau awal bulan akan melakukan sosialisasi kembali,” katanya.

Potensi PAD lainnya, yakni UPT pelabuhan penyeberangan juga akan diberlakukan sistem pembayaran non tunai.

“Hal ini, setahap demi setahap dilakukan demi maksimalisasi pendapatan retribusi,” jelasnya.

Bedjo melanjutkan, anggaran tahun ini Dishub Banjarmasin mendapat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 112 miliar.

“Dengan agenda seperti pembuatan lab KIR, koneksi angkutan transportasi darat dan sungai dan beberapa kegiatan lainnya. Pihak kita optimis dengan anggaran tersebut dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah Banjarmasin,” tukasnya.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/tahun-ini-dishub-maksimalkan-retribusi-kir/>, 19 Januari 2023.
2. <https://seputaran.id/dishub-banjarmasin-kerjakan-proyek-prioritas-walikota-dan-maksimalkan-realisisasi-pad/1>, 21 Januari 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu